

**POLICY BRIEF**

# **REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA**

**MARETA RYARSA HANYFA**

202020100034

**IKKO DELLA PRAMESWARY**

202020100001

**NUR MAULIDIAH**

202020100002

**AHMAD RIZAL**

202020100009



# KONTEKS

**1). EXECUTIVE SUMMARY**

**2) PENDAHULUAN**

**3) TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN**

**4) REKOMENDASI KEBIJAKAN**

**5) RENCANA TINDAK KEBIJAKAN**



# EXECUTIVE SUMMARY

**Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Dalam dekade 2020-2030 ini, Indonesia sedang mengalami fase Bonus Demografi. Prediksi Badan Kependudukan perihal kuantitas manusia berusia produktif (15-64 tahun) benar-benar terjadi.**



**Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, sistem pendidikan dibagi menjadi tiga bagian. Salah satunya adalah model pembelajaran vokasional (berorientasi pada dunia kerja). Pembelajaran jenis ini menitikberatkan proses belajarnya pada praktek. Kegiatan belajar-mengajar yang vokasional akan membentuk keterampilan baru. Apabila pendidikan vokasi diperbanyak maka kemungkinan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja menjadi lebih besar. pendidikan vokasi disinyalir dapat menjadi tumpuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Sumber daya manusia semacam itu akan meningkatkan peluang Indonesia untuk menuju cita-cita emasnya pada tahun 2045 mendatang.**

# PENDAHULUAN

**Sekolah vokasi adalah pendidikan keahlian setara dengan politeknik. Pada dasarnya pendidikan yang lebih berorientasi pada penerapan ilmu. Lulusannya harus berkompeten dan terampil dalam bekerja. Begitu juga dengan para pengajarnya, harus memiliki sertifikasi profesi. Model pembelajaran sekolah vokasi berbeda dengan sistem pendidikan akademik seperti jenjang Sarjana, Magister atau Doktor.**

**Tujuan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang dilakukan dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam Peraturan Presiden ini adalah:**

- 1.meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;**
- 2.mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja;**
- 3.melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia/tenaga kerja Indonesia;**
- 4.membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha; dan**
- 5.mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**

**Jika pada pendidikan akademik menekankan ilmu pengetahuan, sekolah vokasi menekankan pembelajaran yang terstruktur dan keahlian yang lebih driven atau terarah. Menurut data Kemenristekdikti, pendidikan vokasional di Indonesia terdiri dari 1.365 lembaga pendidikan, di antaranya 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. Pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari seluruh institusi pendidikan yang ada di tanah air.**



Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Revitalisasi pendidikan vokasi diproyeksikan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan Abad ke-21 pada kurun 15 tahun mendatang. Targetnya, Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada tahun 2030. Dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki peran yang strategis. Kemendikbud melakukan berbagai program revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), pendidikan khusus, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Program-program Kemendikbud terkait revitalisasi pendidikan vokasi antara lain menambah jumlah guru produktif, meningkatkan kompetensi guru produktif, perbaikan sarana dan prasarana praktikum, sertifikasi keterampilan bagi guru dan siswa SMK, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan lain-lain. Kemnaker RI telah menjadikan pelatihan vokasi sebagai program prioritas yang tentunya akan lebih masif agar tercipta bibit SDM Indonesia yang berkualitas. Seiring dengan revolusi industri jilid keempat (industry 4.0) dan berkembangnya teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam kini telah bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi (ICT) dan kompetensi angkatan kerja.



## TELAAH KRITIS TERHADAP MASALAH

### POLICY BRIEF

Berdasarkan landasan hukum pelaksanaan program Pendidikan Vokasi Nasional PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI dan Peraturan Presiden 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi bertujuan untuk Menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyosong Indonesia Emas 2045. Adanya kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi adalah untuk menciptakan pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu. Sedangkan Pelatihan Vokasi maksudnya dalam Perpres ini adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.



A  
N  
A  
L  
I  
S  
I  
S  
W  
O  
T

## Strengths (Kekuatan)

1. Pendidikan vokasi memberikan keterampilan praktis bagi siswa yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.
2. Program-program vokasi dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan pendidikan umum.
3. Terdapat kebutuhan yang tinggi untuk tenaga kerja vokasi di sektor-sektor industri seperti manufaktur, otomotif, teknologi, pariwisata, dan lain-lain.

## Weaknesses (Kelemahan)

1. Rendahnya perhatian dan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi, sehingga terjadi stigmatisasi bahwa vokasi merupakan pilihan belajar "alternatif" yang kurang prestisius.
2. Kurangnya kualitas fasilitas dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
3. Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas dalam bidang vokasi.

### POLICY BRIEF

# ANALISIS SWOT

## *Opportunities (Peluang)*

1. Dukungan pemerintah dan program-program pemerintah yang berfokus pada pengembangan pendidikan vokasi.
2. Kerjasama dengan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Adanya permintaan tenaga kerja vokasi yang terus meningkat.



## ***Threats (Ancaman)***

1. Persaingan dengan lulusan pendidikan umum yang lebih banyak jumlahnya dan juga mencari pekerjaan di sektor yang sama.
2. Kurangnya investasi dari pihak swasta dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi.
3. Perubahan teknologi yang cepat, membutuhkan kurikulum yang dapat beradaptasi dengan cepat.



**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

*Sistem pendidikan vokasi belum bersinergi dengan industri sehingga diperlukan kebijakan sistem ganda atau dual system artinya bekerja sambil sekolah. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi melalui Revitalisasi Penyelenggaraan.*

- 1. Mewajibkan semua lembaga pendidikan vokasi memiliki mitra industri*
- 2. Status Politeknik diarahkan menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Badan Hukum) sedangkan SMKN menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)*
- 3. Politeknik diarahkan membuka program D4/S1 Terapan. Lulusan program ini akan mendapat gelar S1 Terapan sampai dengan S3 Terapan.*
- 4. SMK diarahkan untuk membuka SMK 4 tahun (fast track D-2)*
- 5. Mengevaluasi daya serap lulusan lembaga pendidikan vokasi ke DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dalam 1 tahun setelah lulus*
- 6. Mendorong para Dosenreknisi untuk melakukan upskilling reskill/ing serta penelitian agar mencapai guru besar dan mendukung pengembangan industri 4.0 ke revolusi 5.0 saat ini*
- 7. Mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas sarpras berstandar industri*

Selain itu perlunya kebijakan yang memungkinkan siswa untuk menimba pengalaman melalui praktik bekerja di dunia industri yang dapat diakui baik oleh SMK ataupun Pendidikan Tinggi dan memungkinkan siswa untuk mengambil mata pelajaran atau materi di luar materi inti dari bidang keahlian yang diambilnya.

# RENCANA TINDAK KEBIJAKAN

POLICY BRIEF



- Kampanye sosialisasi tentang pentingnya pendidikan vokasi dan memberikan informasi mengenai peluang kerja yang tersedia.
- Penyempurnaan kurikulum yang lebih berkualitas, relevan dengan kebutuhan industri, dan didukung oleh teknologi terkini.
- Pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pengajar vokasi untuk meningkatkan kompetensi mereka serta memastikan mereka mendapatkan pembaruan pengetahuan terkait perkembangan industri.
- Meningkatkan kerjasama dengan sektor industri melalui program magang dan kerjasama penelitian dan pengembangan.
- Dukungan keuangan dan investasi dari sektor swasta untuk perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi.